

Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2019

Sri Rosmawati¹, Febriana Kartikasari²

Jurusan Manajemen, STIE-GK Muara Bulian – Jambi
Jl. Gajah Mada, Telp. (0743) 23022
Email: srirosmawati44@gmail.com

Abstract

The purpose of this study are: (1) To determine the development of Regional Original Revenue in Batang Hari Regency in 2014-2019. (2) To determine the effectiveness ratio of the Regional Original Revenue of Batang Hari Regency in 2014-2019. (3) To determine the ratio of Independence of Regional Original Revenue in Batang Hari Regency in 2014-2019, the research method used is descriptive quantitative. The type of data used is secondary data from the Batang Hari APBD which has been published during the 2014-2019 period obtained from www.djpk.kemenkeu.go.id. The results showed that the development of local revenue in Batang Hari Regency during the 2014-2019 period fluctuated. The fluctuation that is shown is not only an increase but also a decrease. The results of the calculation of the effectiveness ratio of Batang Hari Regency PAD for the 2014-2019 period show that it is effective for 2014. Meanwhile, for 2018 and 2019, the effectiveness ratio is ineffective, because it is still below 100 percent, which means that the target of Regional Original Income has not been achieved. The Independence Ratio of Batang Hari Regency for the period 2014-2019 shows that the criteria for the independence of Batang Hari Regency are very lacking.

Keywords: Performance, finance, area.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019. (2) Untuk mengetahui rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019. (3) Untuk mengetahui rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari APBD Kabupaten Batang Hari yang telah dipublikasi selama periode 2014-2019 yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari selama periode 2014-2019 mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang ditunjukkan tidak hanya adanya kenaikan saja akan tetapi terjadi juga penurunan. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Batang Hari periode 2014-2019 menunjukkan efektif untuk tahun 2014. Sementara itu untuk tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan rasio efektivitas yang tidak efektif, karena masih dibawah 100 persen yang artinya bahwa target Pendapatan Asli Daerah masih belum tercapai. Rasio Kemandirian Kabupaten Batang Hari periode 2014-2019 menunjukkan kriteria kemandirian Kabupaten Batang Hari sangat kurang.

Kata kunci: Kinerja, keuangan, daerah.

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arshad,1997). Ketika otonomi daerah dilaksanakan, harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri didalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan



wilayahnya sendiri. Penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri, sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah atau lebih dikenal dengan sebutan APBD merupakan suatu kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja, serta alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja.

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain menimbulkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Pada hakekatnya, kemampuan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu daerah dengan daerah lainnya. Disatu pihak, beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang mempunyai sumber-sumber penerimaan yang bersifat potensial. Dilain pihak, banyak kabupaten/kota yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya.

Penilaian kinerja dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) menjelaskan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah adalah dengan penilaian menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio pajak (*tax ratio*), ruang fiskal (*fiscal space*), serta rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan yang utama bagi daerah. Sementara Dana perimbangan yang merupakan transfer dari Pusat diharapkan hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Setelah hampir dua puluh tahun otonomi daerah, kinerja keuangan seluruh kabupaten di Indonesia diharapkan akan mengalami perubahan. Tidak terkecuali untuk Kabupaten Batang Hari, diharapkan memiliki kinerja keuangan yang baik.

1.1. Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019. (2) Bagaimana Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019. (3) Bagaimana Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019. (2) Untuk mengetahui rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019. (3) Untuk mengetahui rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2014-2019.

2. Tinjauan Pustaka

Efektivitas menurut Siagian yang dikutip oleh Mamuja yang dikutip oleh Jasasila (2017) mendefinisikan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.



Menurut Bastian (2006:112), kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak.

Menurut Mulyadi (2007), kinerja yang merupakan keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

2.1. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor. Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

2.2. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan penurunan kinerja pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Perkembangan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$



Keterangan: PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun yang diteliti
 PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.

2.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
($x > 100\%$)	Efektif
($x = 100\%$)	Efektivitas Berimbang
($x < 100\%$)	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

Rasio Kemandirian PAD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{TOTAL PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Dengan kriteria pengukuran menggunakan skala interval kemandirian yang disusun oleh Litbang Depdagri (1991):

Tabel 3.2 Rasio Kemandirian PAD

No	Nilai	Kriteria
1	0% - 10%	Sangat Kurang
2	10% - 20%	Kurang
3	20% - 30%	Sedang
4	30% - 40%	Cukup
5	40% - 50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber : Litbang Depdagri (1991)

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa APBD Kabupaten Batang Hari yang telah dipublikasi selama periode 2014-2019 yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.3 Alat Analisis

1. Untuk menghitung perkembangan PAD

Perkembangan Pendapatan asli Daerah menggambarkan tingkat perkembangan PAD tahun analisis dengan tahun sebelumnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Perkembangan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun yang diteliti

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.

2. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$



3. Rasio Kemandirian PAD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{TOTAL PENDAPATAN}} \times 100\%$$

4. Hasil Penelitian

4.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2019

Tahun	PAD	Perkembangan
2013	Rp 50.624.238.098	-
2014	Rp 70.809.104.650	39,87%
2015	Rp 68.925.708.044	-2,66%
2016	Rp 73.516.765.630	6,66%
2017	Rp 87.929.338.843	19,60%
2018	Rp 98.808.531.272	12,37%
2019	Rp 91.567.449.215	-7,33%

Sumber : djpk.Depkeu. data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari selama periode 2014-2019 mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang ditunjukkan tidak hanya adanya kenaikan saja akan tetapi terjadi juga penurunan. Perkembangan yang tertinggi dalam periode 2014-2019 adalah pada tahun 2014, terjadi perkembangan sebesar 39,87 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada setiap komponen PAD, terutama yang sangat signifikan adalah kenaikan pada Retribusi Daerah sebesar 59,52 persen dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 73,40 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. Untuk tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,66 persen dari tahun 2014. Penurunan PAD pada tahun 2015 ini disebabkan karena terjadinya penurunan pada Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah. Penurunan PAD sebesar 7,33 persen terjadi pada tahun 2019. Hal ini terjadi disebabkan adanya penurunan pada Hasil Pajak Daerah yang sangat besar yaitu 59,16 persen dari tahun 2018.

4.2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2019

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	efektifitas
2014	Rp 53.131.291.606	Rp 70.809.104.650	133%
2015	Rp 68.925.708.044	Rp 68.925.708.044	100%
2016	Rp 77.416.792.809	Rp 73.516.765.630	95%
2017	Rp 87.188.800.949	Rp 87.929.338.843	101%
2018	Rp 112.000.000.000	Rp 98.808.531.272	88%
2019	Rp 141.502.561.206	Rp 91.567.449.215	65%

Sumber : djpk.Depkeu. data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Kabupaten Batang Hari periode 2014-2019 menunjukkan efektif untuk tahun 2014. Sementara itu untuk tahun 2018 menunjukkan rasio sebesar 88 persen dan tahun 2019 sebesar 65 persen. Hal ini tentu saja menunjukkan rasio Efektifitas yang tidak efektif, karena masih dibawah 100 persen yang artinya bahwa target Pendapatan Asli Daerah masih belum tercapai. Selama periode 2014-2019, rasio efektifitas terendah adalah pada tahun 2019. Hal ini tentu saja berhubungan dengan terjadinya penurunan pada Hasil Pajak Daerah, yang merupakan komponen dari PAD sebesar 59,16 persen.

4.3. Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2019

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio
2014	Rp 70.809.104.650	Rp 949.770.325.145	7%
2015	Rp 68.925.708.044	Rp 915.356.454.251	8%
2016	Rp 73.516.765.630	Rp 1.075.446.002.666	7%
2017	Rp 87.929.338.843	Rp 1.172.121.770.423	8%



2018	Rp 98.808.531.272	Rp 1.199.729.789.613	8%
2019	Rp 91.567.449.215	Rp 1.320.716.450.456	7%

Sumber : djpk.Depkeu. data diolah

Rasio Kemandirian Kabupataen Batang Hari periode 2014-2019 menunjukkan persentase antara 7 sampai 8 persen. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari terhadap Total Pendapatan sangatlah kecil. Hal ini juga berarti kriteria kemandirian Kabupaten Batang Hari sangat kurang.

5. Penutup

5.1 Simpulan

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari selama periode 2014-2019 mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang ditunjukkan tidak hanya adanya kenaikan saja akan tetapi terjadi juga penurunan.
2. Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Kabupaten Batang Hari periode 2014-2019 menunjukkan efektif untuk tahun 2014. Sementara itu untuk tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan rasio efektifitas yang tidak efektif, karena masih dibawah 100 persen yang artinya bahwa target Pendapatan Asli Daerah masih belum tercapai.
3. Rasio Kemandirian Kabupataen Batang Hari periode 2014-2019 menunjukkan kriteria kemandirian Kabupaten Batang Hari sangat kurang.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dapat meningkatkan kemampuan dalam memperoleh Pendaptan Asli Daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah.
2. Agar lebih teliti dalam hal penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan harapan supaya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih efektif.

6. Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: STIM YKPN
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Arsyad, L. (1997), *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta
- Depdagri, (2004), Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Derah dan Otonomi Daerah
- Depdagri, (2004), Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Halim, A dan Igbal, (2012), *Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Jasasila. 2017. *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Batang Hari 2012-2016*. Muara Bulian: Jambi. J-MAS: Jurnal Manajemen & Sains Vol. 2. No. 2
- Joko Pramono. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Vol.7 No.13, Juli 2014
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo, (2000), *Otonomi dan Keuangan Daerah*, BP FE-UGM, Yogyakarta
- Mohamad Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Akuntansi*. Selemba Empat: Jakarta.

